BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Dari penelitian terdahulu peneliti menemukan judul yang hampir mirip seperti penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut ini penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal/skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan
`1	Yohana Prima, Yuli Ifana Sari, Dwi Fauzia Putra (2021) Peran Karang Taruna Dalam Pembangunan Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu (Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi) Vol. 6, No. 2, September 2021	peran karang taruna dalam pembangunan desa yaitu bagaimana mempersiapkan fisik dan mental dari generasi muda sekarang Keterlibatan karang taruna GEMPAR dalam pembangunan desa yaitu ikut terlibat dalam kegiatan gotong royong masyarakat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Saiffulo. peran karang taruna GEMPAR dalam pembangunan Desa Pandanrejo lebih mengarah kepada bagaimana pengurus karang taruna aktif dalam kegiatan	Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan yang dimana diantaranya dimana peneliti terdahulu focus pada Peran Karang Taruna Dalam Pembangunan Desa sedangkan peneliti saat ini lebih cenderung pada partisipasi karang taruna dalam pengelolaan wisata desa.namun adapun persamaan dari peneliti terdahulu dan peneliti saat ini yakni pada metode penelitian yang menggunakan metode deskripstif dengan pendekatan kualitatif.

		pembangunan non fisik yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti gotong royong bersama.	
2	Siti Nur Kurnia Suci,Tamrin Fathoni (2023) Pemberdayaan Karang Taruna Dalam Meningkatkan Potensi Desa Wisata Melalui Sadar Wisata Di Desa Bancangan Sambit (Journal Of Cpmmunity Development and Disaster Management) Volume 5 Number 2	Pemberdayaan Karang Taruna dalam meningkatkan potensi Alam Desa Bancangan Kabupaten Ponorogo pada tanggal 25 Juli 2022, edukasi mengenai bagaimana mengembangkan potensi alam yang sudah ada dan tersedia di Desa Bancangan agar bisa dimanfaatkan sebagai desa wisata. Bentuk kegiatan pengembangan potensi alam ini dapat dilakukan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kualitas yang baik sehingga pengembangan desa wisata dapat terwujud. Workshop ini di adakan untuk menjawab permasalahan, karena para anggota karang taruna belum mampu untuk membuat pengembangan desa	Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan yang dimana diantaranya lokasi penelitian , peneliti terdahulu focus pada pemberdaan karang taruna dalam meningkatkan potensi desa wisata , sedangkan peneliti saat ini lebih cenderung pada partisipasi karang taruna dalam pengelolaan wisata desa.peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian Asset Based Communities Development(ABCD) Merupakan model pendekatan dalam pengembangan masyarakat sedangkan peneliti saat menggunakan metode penelitian deskripstif dengan pendekatan kualitatif

		wisata yang baik yang mampu diperkenalkan secara optimal	
3	Rizky Editya Rachmansyah , Afifudin, Roni Pindahanto Widodo (2020) Peran karang taruna dalam pengembangan wisata panorama jurang toleh (Studi Pada Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Malang) "Jurnal Respon Publik" Vol. 14, No. 1,	Secara mendasar atau secara esensial desa wisata merupakan pengembangan suatu desa dengan memanfaatkan kemampuan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat dan desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata menjadi satu rangkaian aktivitas pariwisata yang terpadu dan memiliki tema tertentu sesuai dengan karakteristik desa. Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Karang Taruna Muda Karya dan Pemerintah desa jatiguwi yang diharapkan membawa perubahan membutuhkan peranan penting dari semua aspek pendukung untuk tempat wisata Panorama Jurang Toleh di desa Jatiguwi	Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan yang dimana diantaranya lokasi penelitian, peneliti terdahulu focus pada Peran karang taruna dalam pengembangan wisata panorama jurang toleh,sedangkan peneliti saat ini lebih cenderung pada partisipasi karang taruna dalam pengelolaan wisata desa,adapun persamaan pada peneliti terdahulu dan peneliti saat ini yakni pada metode penelitian yang menggunakan metode penelitian yang menggunakan metode deskripstif dengan pendekatan kualitatif.

Sumber: Yohana P, Yuli I,S., Siti N,K, S. , Tamrin F, (2023),Dwi F, P., (2021, Afifudin, Roni P,W., (2020)

2.2 **Konsep**

2.2.1 partisipasi

Made pidarta berpendapat bahwa partisipasi adalah pelibatan seseorang dan beberapa orang dalam suatu kegiatan.keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi,serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksankan serta mendukung pencapaian tunjuan dan tanggung jawab,atas segala keterlibatan.Astuti 2009 dalam (Hadiyanti) dalam buku "Partisipasi dan Identifikasi pembelajaran masyarakat dan orang dewasa".

Partisipasi berasal dari bahasa inggris,*participation* yang berarti pengambilan bagian atau pengikut sertaan.menurut Keith Davis (Hadiyanti) dalam buku "Partisipasi dan Identifikasi pembelajaran masyarakat dan orang dewasa" adalah suatau ketrlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggug jawab didalamnya.sedangkan Hunerryear dan Heoman,memahami partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi semangat terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggug jawab bersama mereka Astuti (2009) Davis (Hadiyanti) dalam buku "Partisipasi dan Identifikasi pembelajaran masyarakat dan orang dewasa"

pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Djalal,F.,dan Supriyadi,D., (2001:201-202), (Hadiyanti) dalam buku "Partisipasi dan Identifikasi pembelajaran masyarakat dan orang dewasa" yang melihat bahwa partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok

atau masyarakat ikut terlibat dalam penyampaian saran dan pendapat barang,keterampilan bahan dan jasa.partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri,mengakji pilihan mereka, membuat keputusan,dan memecahkan maslahnya.

Pakar pendidikan, h,a,r,Tilaar 2009:287 (Hadiyanti) dalam buku "Partisipasi dan Identifikasi pembelajaran masyarakat dan orang dewasa"Mengungkapkan bahwa partisipasi sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentraliasi dimana diupayakan natra lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarkat.

2.2.2 Bentuk dan Tipe Partisipasi

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan dalam suatu program yaitu partisipasi uang,harta benda,tenaga,buah pikiran,keterampilan,sosial,proses pengambilan kepeutusan dan partisipasi reprentatif.Dari berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas,partisipasi dapat dikelompok menjadi dua jenis yaitu,partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak).bentuk partisipasi dalam bentuk nyata misalnya uang,harta benda,tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran,partisipasi sosial,partisipasi pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Berdasarkan partisipasi diatas adapun tipe dari partisipasi, hobley 1996 dalam buku (hadiyanti p 2023:5-7) “partisipasi dan identifikasi pembelajaran masyarakat dan orang dewasa”, mengidentifikasikan adanya 7 tipe partisipasi yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi patif/manipulatif :informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional diluar kelompok sasaran
2. Partisipasi informatif:akurasi hasil penelitian tudak dibahas bersama masyarakat
3. Partisipasi konsulatuf:tidak ada peluang untuk membuat keputusan bersama
4. Partisipasi insentuf
5. Partisipasi fungsional
6. Partisipasi interaktif
7. *Self-mobilization* (mandiri)

2.2.3 Prinsip-Prinsip Partisipasi

mengutip dari panduan pelaksanaan pendekatan partisipasi yang disusun oleh *department for international development (DFID)* sumampouw m,2004:106-107 dalam buku (hadiyanti p 2023:8-10) bahwa prinsip partisipasi mencakup sebagai berikut:

1. Cakupan

semua orang atau wakil-wakil dari setiap kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil .Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu atau wakil dari setiap kelompok yang akan terkena dampak dari suatu keputusan atau proyek

harus dilibatkan dalam prosesnya. Partisipasi harus didasarkan pada keadilan antara semua pihak yang terlibat Partisipasi tidak hanya terbatas pada kelompok yang dominan atau vokal, tetapi harus mencakup semua pihak, termasuk kelompok minoritas, perempuan, lansia, atau kelompok rentan lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap perspektif dan kebutuhan terwakili secara adil.

Cakupan yang luas ini memastikan bahwa semua suara dan pendapat yang relevan dapat didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, cakupan dalam partisipasi dapat membantu meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, karena keputusan tersebut didasarkan pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang kebutuhan dan aspirasi semua pihak yang terkait.

2. Kesetaraan atau kemitraan *(equal partnership)*

pada dasaranya setiap orang mempunyai keterampilan,kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak. Semua pihak yang berpartisipasi, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil, harus memiliki status yang setara dalam proses pengambilan keputusan.

Prinsip ini menolak hubungan yang bersifat hierarkis atau satu arah. Kemitraan yang sejati dibangun atas dasar saling menghormati, tanggung jawab bersama, dan pembagian kekuasaan yang adil, sehingga tidak ada satu pihak yang mendominasi pihak lain. Kesetaraan dan kemitraan dalam partisipasi juga berarti

bahwa setiap pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam prakteknya, kesetaraan dan kemitraan dalam partisipasi dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti dialog yang terbuka dan jujur, proses pengambilan keputusan yang partisipatif, dan pembagian kekuasaan yang adil. Dengan membangun kesetaraan dan kemitraan yang kuat, proses partisipasi dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, serta dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

3. Transparansi

semua pihak harys dapat menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim komunikasi terbuka dan kondisif sehingga menimbulkan dialog, Seluruh proses, dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi, harus terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak yang berpartisipasi. Untuk memulai percakapan, semua pihak harus dapat berkomunikasi secara terbuka dan konstruktif satu sama lain.Transparansi mencakup penyampaian informasi yang jelas dan akurat, termasuk mengenai anggaran, tujuan program, dan hasil yang dicapai. Ini penting untuk membangun kepercayaan, dan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi jalannya proyek.

Transparansi dalam prinsip partisipasi menurut Sumampouw merujuk pada pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam proses partisipasi. transparansi berarti bahwa semua informasi yang relevan tentang proses partisipasi, termasuk tujuan, proses, dan hasil, harus disampaikan secara jelas dan terbuka kepada semua pihak yang terkait. Hal ini memungkinkan semua pihak untuk memahami

proses partisipasi dengan jelas dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat.

Dalam prakteknya, transparansi dalam partisipasi dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti penyediaan informasi yang jelas dan akurat, proses pengambilan keputusan yang terbuka, dan komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terkait. Dengan menerapkan transparansi dalam proses partisipasi, dapat membantu meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa proses partisipasi berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

4. Kesetaraan kewenangan *(sharing power /equal power ship)*

berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi, Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas memberikan masukan, tetapi juga memiliki kewenangan yang nyata dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini berbeda dengan partisipasi yang bersifat tokenistik, di mana masyarakat hanya dilibatkan untuk formalitas. Kewenangan yang setara berarti masyarakat memiliki kekuatan untuk mempengaruhi hasil akhir dan membuat keputusan bersama dengan pihak lain.

kesetaraan kewenangan berarti bahwa masyarakat memiliki kekuatan untuk mempengaruhi hasil akhir dan membuat keputusan bersama dengan pihak lain. Hal ini dapat diwujudkan melalui proses pengambilan keputusan yang partisipatif, di mana semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk

berpartisipasi dan mempengaruhi keputusan. Dengan demikian, kesetaraan kewenangan dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan legitimasi proses partisipasi, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih berkelanjutan dan adil.

5. Kesetaraan tanggung jawab *(sharing responsibility)*

berbagai pihak mempunyai tanggug jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetraan kewenangan *(sharing power)* dan keterlibatannya dalam proses saling belajara dan saling memperdayakan satu sama lain, Seiring dengan kewenangan yang setara, setiap pihak yang terlibat juga harus memikul tanggung jawab yang seimbang atas keberhasilan maupun kegagalan dari suatu program atau proyek. Tanggung jawab bersama ini menciptakan rasa kepemilikan kolektif dan mendorong semua pihak untuk berkontribusi secara maksimal, bukan sekadar menjadi penonton pasif.

Dengan demikian, kesetaraan tanggung jawab dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan legitimasi proses partisipasi, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih berkelanjutan dan adil. kesetaraan tanggung jawab dapat diwujudkan melalui proses pengambilan keputusan yang partisipatif, di mana semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mempengaruhi keputusan. Selain itu, kesetaraan tanggung jawab juga dapat diwujudkan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara semua pihak yang terkait.

6.Kerjasama

diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada,khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia. Dengan kerjasama, semua pihak dapat memanfaatkan kekuatan dan kelebihan masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Hal ini berarti bahwa setiap pihak harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil, serta memastikan bahwa proses partisipasi berjalan dengan efektif dan efisien. tanggung jawab juga berarti bahwa setiap pihak harus memikul konsekuensi atas keberhasilan maupun kegagalan proses partisipasi.

2.2.4 Organisasi Karang Taruna

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang taruna adalah wadah bagi sumber daya manusia dari kelompok generasi muda yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial. Banyak daerah-daerah yang tersebar di wilayah Republik Indonesia memperoleh pendapatan yang cukup fantastis dari sektor pariwisata. Oleh karena itu, pengembangan industri pariwisata merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan daerahnya. Menurut Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Karang taruna merupakan sutu wadah organisasi yang beranggotakan pemuda maupun pemudi disuatu desa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang perkembangan beberaapa bidang didalam desa.karang taruna mulai didirikan pata tanggal 26september 1960 dijakarta,tepatnya kampung melayu.lahirnya organisasi ini merupakan wujud kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah permasalahan sosial yang tercipta dilingkungan masyarakat.

Diera sekarang ini karang taruna memiliki kedudukan yang penting misalnya dalam pengembangan ide kreatif dan kebebasan berekpresi secara positif,kegiatan yang dilakukan karang taruna tentunya harus mendapat persetujuan dari pihak pemerintah desa karena karang taruna sendiri merupakan organisasi yang masih ada dalam lingkup desa.pemerintah desa tentunya mendukung setiap kegiatan positif yang dilakukan,hal tersebut supaya berdampak pada kemanjuan desa.

2.2.5 Peranan Karang Taruna

Menurut Margono Slamet Peranan adalah “mencakup tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati posisi didalam status sosial”. (Slamet, 1995) Dan berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Mendagri, 2007), Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat.

2.3 Pengelolaan

Menurut Griffin (2004), pengelolaan berarti mencapai tujuan organisasi.dengan memaksimalkan kinerja tugas dan tanggug jawab setiap anggota serta memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya organisasi.Nugroho (2003:119) mengatakan bahwa dalam bidang manajemen "pengelolaan"adalah istilah yang digunakan.istilah pengelolaan berasal dari istilah "kelola" yang biasanya merujuk pada pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

2.3.1 Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan :

1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.

3) Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, Afifiddin (2010 : 3) menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

a. Menentukan strategi
b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.

2.4 Wisata Desa

Desa adalah sekelompok keluarga yang mendiami sekelompok rumah dalam satu tempat atau wilayah diluar kota yang memiliki aktivitas budaya. Desa adalah suatu tempat yang terutama untuk temp at tinggal dan bahkan terutama sebagai pusat perdagangan. Desa-desa itu disusun sebagian besar oleh rumah-rumah pertanian dan dihubungkan dengan bangunan tambahan (Finch, 1957),dalam (Dilahur,2016)

Menurut Nuryanti, Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yan menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Sedangkan menurut Joshi. Desa wisata (rural tourism) merupakan pariwisata yang

terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur-unsur unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan.

Mengutip dari pendapat Subagyo ,(Novia Arini Huwaida,) dalam buku pedoman pemberdayaan masyarakat desa berbasis kelembagaan lokal dalam peningkatan ekonomi desa wargasara, pulau tunda, kabupaten serang jika dilihat dari perspektif kehidupan masyarakatnya, pariwisata pedesaan atau desa wisata merupakan suatu bentuk wisata dengan objek dan daya tarik berupa kehidupan desa yang memiliki ciri-ciri khusus dalam masyarakatnya, panorama alam dan budayanya, sehingga mempunyai peluang untuk dijadikan komoditi bagi wisatawan khususnya wisatawan asing.

Menurut Peraturan Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, desa wisata adalah suatu bentuk kesatuan antara akomodasi, atraksi, sarana dan prasarana pendukung wisata yang disajikan dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi yang berlaku. Sehingga unsur dari pengembangan desa wisata adalah pemahaman akan unsur yang ada di desa wisata yaitu; lingkungan alam, budaya masyarakat, arsitektur, sosial ekonomi, struktur tata ruang dan aspek historis, termasuk kemampuan dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lain sesuai kearifan lokal masyarakat.

2.4.1 Komponen-komponen Desa Wisata

Dalam pengembangan desa wisata yang menjadi salah satu faktor pentingnya adalah keaslian dari desa setempat serta integrasi dari komponen pariwisata yang ada. Komponen untuk pengembangan desa wisata ini tidak jauh berbeda dengan komponen pariwisata**.** Pariwisata Perdesaan adalah suatu wilayah perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan, baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat–istiadat keseharian, arsitektur bangunan maupun struktur tata ruang desa yang khas atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan yaitu, atraksi, akomodasi, oleh karena itu agar dapat menjadi pusat perhatian pengunjung, desa tersebut pada hakikatnya harus memiliki hal yang penting, antara lain:

1. Keunikan, keaslian, sifat khas
2. Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa
3. Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik minat pengunjung
4. Memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar, maupun sarana lainnya.